

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditya, T. A. C. (2021). Tinjauan yuridis terhadap pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dharmasisiwa.
- Aprita, S. (2021). Penerapan asas kelangsungan usaha menggunakan uji insolvency. Pustaka Abadi.
- Berg, L. N. (2017). Legal protection: The basis of classification, types, legal science and law enforcement practice.
- Fuady, M. (2005). Hukum pailit dalam teori dan praktik. Mandar Maju.
- Gisymar, N. A. (2014). Hukum pasar modal Indonesia. PT Citra Aditya Bakti.
- Hage, J. (2009). The meaning of legal status words. Springer Netherlands.
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana Prenada Group.
- Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). Pedoman menangani perkara kepailitan. PT Raja Grafindo Persada.
- Muryati, D. T. (2017). Pengaturan tanggung jawab kurator... (buku ajar).
- Nasarudin, M. I., Surya, I., Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarmarman. (2004). Aspek hukum pasar modal Indonesia. Prenada Media.
- Nating, I. (2004). Peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. PT Raja Grafindo Persada.
- Romli, S. A. (2024). Buku perlindungan hukum. CV Doki Course and Training.
- Sastrawidjaja, M. S. (2006). Hukum kepailitan dan PKPU. Permada Media.
- Shubhan, H. (2008). Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan. Prenada Media Group.
- Shubhan, H. (2018). Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan. Kencana Prenada Media Group.
- Sinurat, M., Gunawan, D., & Syahputra, A. (2022). Buku ajar pasar modal. PT Inovasi Pratama Internasional.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Sjahdeini, S. R. (2016). Hukum kepailitan. Pustaka Utama Grafiti.
- Widiyanti, S. A. (2008). Perlindungan kreditor dan debitor dalam hukum kepailitan.

B. Jurnal, Artikel Ilmiah dan Tesis

- Aidi, Z., & Farida, H. (2019). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian waralaba makanan. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2), 207–230.
- Al Faridzi, E. (2022). Tanggung jawab kurator... *Jurist-Diction*, 5(6), 2184.
- Andani, D. (2022). Perlindungan hukum kepailitan perusahaan solvable. *Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 83.

- Aprita, S. (2023). *Insolvency-based justice...* Pustaka Abadi.
- Berg, L. N. (2017). *Legal protection...* *Legal Science and Law Enforcement Practice*, 3, 22–27.
- Daffa, A. P. et al. (2023). *Perlindungan hukum dengan UU 23/2019...* *Sovereignty Journal*, 2(2), 188–200.
- Dimiyati, H. H. (2014). *Perlindungan hukum investor dalam pasar modal.* *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 350.
- Fauziah, R. N. F. (2020). *Kepailitan dan akibat kepailitan...* *Artikel DJKN.*
- Fayzur R., et al. (2021). *The idea of rights.* *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(5), 16–24.
- Isnawati, F. A. T., & Mahmudah, S. (2023). *Perlindungan hukum pemegang saham...* *UNES Law Review*, 6(2), 7103.
- Kadang, A. Z., et al. (2022). *Tinjauan yuridis kepailitan akibat pembatalan homologasi.* *Journal of Legal Research*, 4(3), 823.
- Khairunnisa, S., & Nefi, A. (2024). *Sengketa amandemen akta perdamaian PKPU.* *Jurnal Hukum To-Ra*, 1595.
- Lontoh, R. A., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). *Penyelesaian utang-piutang melalui pailit.* *Jurnal Alumni*, 47.
- Mahfud, M. F. (2024). *Analisis penggunaan pasal 112...* *JICSL*, 7(1), 1–18.
- Mentari, N. (2023). *Indonesia SIPF.* *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 3(1), 8–22.
- Muljadi, Y. S. S. (2024). *Keamanan dan perlindungan hukum investor.* *Hakim Journal*, 2(2), 350–358.
- Murdayantin, F. U. (2024). *Akibat kepailitan perusahaan efek...* *Kajian Kontemporer Hukum*, 12.
- Napitupulu, T. A., et al. (2022). *Pengurusan harta pailit oleh kurator.* *Jurnal Retentum*, 3(2), 76.
- Narwanto, J. (2025). *Perlindungan hukum terhadap investor pasar modal.* *Tesis UII.*
- Novita, T. R., & Husna, M. F. (2019). *Curator's responsibility...* *European Journal of Social Sciences Studies*, 4(2), 95.
- Nuranisa, A., & Pratama, P. W. (2023). *Management of bankrupt assets...* *UNTAG Law Review*, 7(2), 79.
- Patni, N. K. E., & Wiryawan, I. W. (2023). *Legal protection of curators.* *SIBATIK Journal*, 2(2), 1719.
- Prananta, I. H., & Prananingtyas, P. (2019). *Analisis perdamaian PKPU PT Njonja Meneer.* *Notarius*, 12(2), 1085.
- Pribadi Sihotang, D. (2024). *Pertanggungjawaban debitor setelah homologasi.* *Jurnal Hukum Pendidikan*, 1(2), 8.
- Pratama, N., & Putra, M. F. (2023). *PKPU revocation.* *Jurnal Kosmik Hukum*, 23(1), 20.
- Rahmadini, V. N. (2019). *Perlindungan hukum investor pasar modal.* *Pena Justisia*, 18(2), 93.
- Reni, A. E. (2022). *Legal protection and defense concepts.* *SHS Web of Conferences*, 134–122.
- Rizki, M. J. (2022). *Kedudukan pemegang saham publik.* *Hukum Online.*

- Rizki, M. J. (2025). Kewenangan OJK mengajukan kepailitan. *Hukum Online*.
- Rusli, T. (2019). *Hukum kepailitan di Indonesia*. UBL Press.
- Santika, S., & Suyatno. (2024). Legal protection online trading investors. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(5), 4038.
- Sitepu, Y. A. (2023). Pembatalan perdamaian dalam PKPU. *Pediaqu Journal*, 2(1), 437.
- Sunggara, M. A., & Yuhelson. (2018). Curator responsibility. *Proceeding of Community Development*, 2(1), 41.
- Suroso, J. T., & Hernawati, R. (2020). Kepastian hukum investasi. *MEA Journal*, 4(1), 394.
- Tryadi, L., & Ananingsih, S. W. (2024). Perlindungan hukum pemegang saham pailit. *JIHHP*, 5(2), 1047
- Hukumku.id. (2025). Syarat-syarat perusahaan dinyatakan pailit. [https://www.hukumku.id/...](https://www.hukumku.id/)
- Hukumonline.com. (2025). Menerapkan asas keadilan dalam konsep hukum kepailitan. <https://www.hukumonline.com/>
- KBBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Legal Centric. (2019). Upaya preventif dan represif. <https://legalcentric.com/>

C. Peraturan Perundang–Undanga

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- POJK No. 26/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Emiten.

E. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus/PKPU/2021.
- Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 2/Pdt.Sus-homologasi/2024 jo. 12/Pdt.Sus/PKPU/2021.
- Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jakarta Pusat.